



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KOMISI IX DPR RI**

---

- Tahun Sidang : 2016-2017
- Masa Persidangan : V
- Rapat ke : 4
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
- Dengan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari/tanggal : Selasa, 30 Mei 2017
- Pukul : 14.00 WIB – selesai
- Acara :
  1. Pendataan Keluarga 2015 bertujuan untuk memperoleh data keluarga *by name by address* yang dipergunakan dalam penetapan sasaran dan optimalisasi operasional program pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), serta intervensi berbagai program pembangunan lainnya. Mohon dilaporkan hasil pendataan keluarga 2015 tersebut dan sejauh mana pemanfaatannya bagi program KKBPK.
  2. Berdasarkan target pembangunan bidang kesehatan tahun 2017, Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence Rate/CPR*) ditargetkan mencapai 65,6%. Target ini disusun berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI, 2012) dimana angka CPR sebesar 61,9%. Bagaimana ketersediaan Alat dan Obat kontrasepsi dalam mewujudkan hal tersebut?
  3. Mohon penjelasan dari Kepala BKKBN dalam rangka mewujudkan Angka kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) per perempuan usia reproduksi 15-49 tahun sebesar 2,33 pada tahun 2017 sesuai target pembangunan bidang kesehatan tahun 2017.

4. Berdasarkan data Susenas 2015, Angka kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) sebesar 18,33% dari pasangan usia subur (PUS) yang ada. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Kepala BKKBN untuk memenuhi kebutuhan KB di masyarakat.

Ketua Rapat : H. Syamsul Bachri S. M.Sc//Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

Sekretaris Rapat : Eko Riswanto, SE./Kepala Sub Bagian Rapat Sekretariat Komisi IX DPR RI

Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI  
Gedung Nusantara I Lt.1 DPR-RI  
Jl.Jend. Gatot Subroto, Jakarta

Hadir : A. 26 orang dari 48 orang Anggota Komisi IX DPR RI;  
B. Kepala BKKBN beserta jajarannya;

## I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dibuka pukul 14.50 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI meminta BKKBN RI untuk menjadikan hasil Pendataan Keluarga tahun 2015 beserta pemutakhiran data yang dilakukan tiap tahunnya sebagai acuan dan kebijakan dalam penyusunan program pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP).
2. Dalam rangka pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia, Komisi IX DPR RI meminta BKKBN RI untuk meningkatkan kualitas instrumen pemutakhiran data termasuk kemampuan petugas pengumpulan data, petunjuk teknis pendataan, dan penyempurnaan sistem aplikasi pendataan sehingga validitas dan realibilitas data dapat terjaga.
3. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN RI untuk senantiasa menjaga ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan KB serta meningkatkan sosialisasi penggunaan alat dan obat kontrasepsi pada pria.
4. Dengan meningkatnya usia harapan hidup di Indonesia yang mengakibatkan jumlah orang lanjut usia (lansia) semakin besar, Komisi IX DPR RI meminta

BKKBN RI untuk mempersiapkan terjadinya ledakan jumlah penduduk kategori lansia dengan membuat program pemberdayaan lansia.

5. Untuk meningkatkan sinergitas program Kampung KB, Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN RI untuk melakukan kerjasama lintas sektor dengan Kementerian/Lembaga lainnya dalam kegiatan Kampung KB dengan difasilitasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
6. Komisi IX DPR RI meminta kepada BKKBN RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota Komisi IX DPR RI selambat-lambatnya tanggal 9 Juni 2017.

**Rapat diakhiri pukul 17.10 WIB.**

Ketua Rapat/  
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI,



H. SYAMSUL BACHRI S, M.Sc

A-312